

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014**

SKRIPSI



Oleh.

NANDA ISYOKO
NPM. 16810138

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO
FAKULTAS HUKUM
2022**

ABSTRAK

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Oleh.

NANDA ISYOKO

NPM. 16810138

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan dalam penulisan ini adalah: a. Bagaimanakah Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014?. b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan desa di Desa Notoharjo Kabupaten Lampung Tengah?.

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pendekatan metode empiris yaitu survei ke lapangan dan melakukan proses wawancara langsung dengan para narasumber.

Kesimpulan sebagai berikut: 1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan Peraturan Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebagai mitra pemerintah telah melaksanakan fungsinya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, peraturan desa yang dibuat itu terkait dengan kepentingan, kebutuhan, serta harapan dari seluruh masyarakat desa baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. 2. Yang menjadi faktor penghambat dalam pembangunan desa di Desa Notoharjo Kabupaten Lampung Tengah, adalah terbatasnya anggaran dana dari pemerintah sehingga menyebabkan adanya program pembangunan yang harus diusulkan beberapa kali, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat juga turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan khususnya pengadaan penerangan jalan yang dianggarkan dari dana swadaya masyarakat, dan yang terakhir adalah kurang berpartisipasinya masyarakat karena kurang tersedianya waktu untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Saran dari penulis adalah: 1. Perlu ditingkatkan koordinasi antar sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Notoharjo dan perlu ditingkatkan lagi keaktifan anggota BPD dalam menghadiri rapat demi kemajuan pembangunan di Desa Notoharjo. 2. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya lebih meningkatkan pengawasan kinerja terhadap kepala desa guna menjamin proses akuntabilitas, transparansi.

ABSTRAK

Functions of the Village Consultative Body (Bpd) in Making Village Regulations Judging from Law Number 6 of 2014

By.
NANDA ISYOKO
NPM. 16810138

As in Article 1 paragraph (2) of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, that the function of government is a function in carrying out government administration which includes the tasks of regulation, service, development, empowerment, and protection. Law Number 6 of 2014 concerning Villages explains that Village Government is the administration of government affairs and the interests of local communities in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The problems in this writing are: a. How is the function of the Village Consultative Body (BPD) in making village regulations in terms of Law Number 6 of 2014?. b. What are the inhibiting factors in village development in Notoharjo Village, Central Lampung Regency?.

The research method used is an empirical method approach, namely surveys to the field and conducting direct interviews with the informants.

The conclusions are as follows: 1. The function of the Village Consultative Body in making Village Regulations is reviewed from Law Number 6 of 2014. As a partner of the government, it has carried out its functions well in the continuity of village development and established village regulations with the Village Head, the village regulations made are related with the interests, needs, and expectations of the entire village community both in planning and implementation. 2. The inhibiting factor in village development in Notoharjo Village, Central Lampung Regency, is the limited budget of funds from the government, causing a development program to be proposed several times, the low level of community income is also an inhibiting factor in development, especially the budgeted procurement of street lighting. from community self-help funds, and the last is the lack of community participation due to the lack of time available to participate in village development.

Suggestions from the authors are: 1. It is necessary to improve coordination among fellow members of the Village Consultative Body in Notoharjo Village and it is necessary to increase the activity of BPD members in attending meetings for the progress of development in Notoharjo Village. 2. The Village Consultative Body should further improve the monitoring of the performance of the village head in order to ensure the process of accountability and transparenc

PERSETUJUAN

Skripsi Oleh **NANDA ISYOKO** ini,
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Metro, 07 Maret 2022

Pembimbing I,



Drs. H. RIDHWAN, SH. MH.
NIDK. 8867170018

Metro, 07 Maret 2022

Pembimbing II,



INTAN PELANGI, SH. LLM
NIDN. 0226088602

Ka. Prodi Hukum,



NITARIA ANGKASA, SH. MH
NIDN. 0210048502

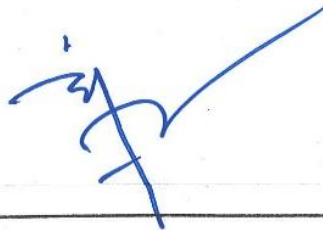
PENGESAHAN

Skripsi Oleh **NANDA ISYOKO** ini,
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal : 07 Maret 2022

TIM PENGUJI



Drs. H. RIDHWAN, SH. MH. _____, Ketua
NIDK. 8867170018



Dr. ISKANDAR, SH. MH _____, Penguji Utama
NIDN. 0202056801



INTAN PELANGI, SH. LLM _____, Sekretaris
NIDN. 0226088602

Mengetahui
Dekan,



M. SHOFWAN TAUFIQ, S.HI. M.SI
NIDN. 0203038604

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANDA ISYOKO
NPM : 16810138
Prodi : Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :
**“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembuatan
Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam
keadaan sehat wal’afiat.

Metro, 07 Maret 2022

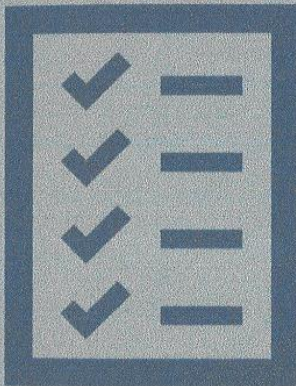


Nanda Isyoko

NANDA ISYOKO
NPM. 16810138



UNIT PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
METRO



SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 2645/II.3.AU/F/UPI-UK/2021

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NANDA ISYOKO
NPM : 16810138
Jenis Dokumen : SKRIPSI

JUDUL:

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Turnitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase $\leq 20\%$. Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 30 Desember 2021
Kepala Unit,

Swaditya Rizki, S.Si., M.Sc.
NIDN. 0224018703

alamat:

Jl. Hajar Dewantara No.116
Kemulyo, Kec. Metro Timur Kota
Metro, Lampung, Indonesia

Website: www.upi.ummetro.ac.id

Email: upi@ummetro.ac.id

RIWAYAT HIDUP

Nama : NANDA ISYOKO

NPM : 16810138

Temp, Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Lampung Tengah.

Penulis adalah anak ke 6 (enam) dari 6 (enam) bersaudara.

Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis, yaitu:

1. TK lulus pada Tahun
2. SD lulus pada tahun
3. SMP lulus pada tahun
4. SMA lulus pada tahun.
5. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2015.
6. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada bulan Agustus pada tahun 2022.

Penulis,



NANDA ISYOKO
NPM. 16810138

MOTTO

**Setiap Orang Berkedudukan Yang Sama Dimuka
Hukum, Jauhi Pelanggaran, Jadilah Masyarakat
Cerdas Hukum**

Hidup Adalah Kumpulan Keyakinan Dan Perjuangan

**Kesuksesan Adalah Hasil dari Kesempurnaan,
Kerja Keras, Belajar dari Pengalaman, Loyalitas,
dan Kegigihan**

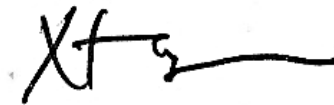
PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita tak terhingga kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih, yaitu:

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karya ini kepada :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta yang menjadi semangat penulis untuk terus berkarya.
2. Ayah mertua dan ibu mertua yang juga selalu memberikan dukungan.
3. Istriku yang selalu memberikan semangat dan dukungannya selama ini.
4. Anak-anakku yang saya cintai sebagai penyemangat selama ini.
5. Saudara-saudara penulis yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk terus belajar meraih kesuksesan;
6. Untuk semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Metro Fakultas Hukum;

Penulis,



NANDA ISYOKO
NPM. 16810138

KATA PENGANTAR

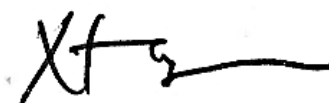
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
3. Bapak Drs. H. Ridhwan, SH. MH, sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Intan Pelani, SH. MH sebagai pembimbing II, yang banyak memberi arahan dan membantu serta memudahkan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini.
5. Ibu Nitaria Angkasa, SH. MH sebagai Kaprodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
6. Semua teman-teman terdekatku dan almamater Fakultas Hukum UM. Metro yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selama ini bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 07 Maret 2022



NANDA ISYOKO
NPM. 16810138

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penelitian	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	18
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
C. Penyalahgunaan Narkotika	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber	33
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Nara Sumber	58
B. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembuatan Peraturan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014	58
C. Yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Notoharjo Kabupaten Lampung Tengah.....	66
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA